



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR 107/O/1997

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1997**

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/O/1997

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penergerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990;
- c. Nomor 29 Tahun 1990;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0222b/O/1980;
- d. Nomor 087/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0486/U/1992;
- j. Nomor 0487/U/1992;
- k. Nomor 0489/U/1992;
- l. Nomor 0490/U/1992;
- m. Nomor 0491/U/1992;
- n. Nomor 054/U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993;
- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-308/I/97 tanggal 8 April 1997.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU Swasta tahun pelajaran 1995/1996.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penerangan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	131 buah;
b.	SLB	Negeri	30 buah;
c.	SLTP	Negeri	9.451 buah;
d.	SMU	Negeri	2.553 buah;
e.	SMK	Negeri	742 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

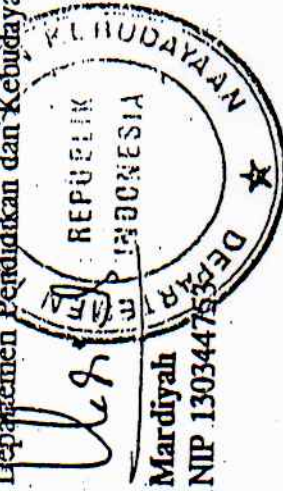
ttd

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



•

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طوبی

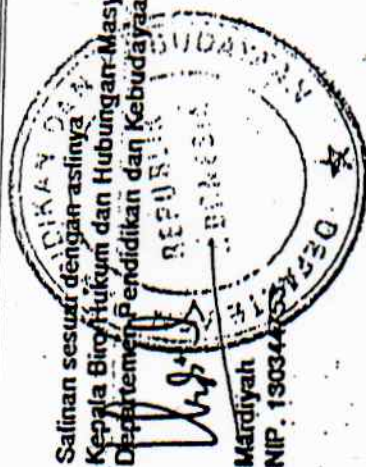
LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 107/O/1997 TANGGAL 16 MEI 1997

NO.	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI		MATA ANGGARAN
				KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	
1	2	3	4	5	6	7
1.	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		11. SLTP Negeri 3 Loa Janan	-	Loa Janan	Kabupaten Kutai	
		12. SLTP Negeri 2 Long Kali	-	Long Kali	Kabupaten Pasir	
		13. SLTP Negeri 3 Waru	-	Waru	Kabupaten Pasir	
		14. SMU Negeri 10 Samarinda	-	Samarinda	Kotamadia Samarinda	11.1.2.4251.23.01.16.5110 11.1.2.4251.23.01.16.5120 11.1.2.4251.23.01.16.5150 11.1.2.4251.23.01.16.5210 11.1.2.4251.23.01.16.5220 11.1.2.4251.23.01.16.5230 11.1.2.4251.23.01.16.5250 11.1.2.4251.23.01.16.5350
		15. SMK Negeri 4 Balikpapan	-	Damai	Kotamadia Balikpapan	11.1.2.4267.23.01.16.5110 11.1.2.4267.23.01.16.5120 11.1.2.4267.23.01.16.5150 11.1.2.4267.23.01.16.5210 11.1.2.4267.23.01.16.5220 11.1.2.4267.23.01.16.5230 11.1.2.4267.23.01.16.5250 11.1.2.4267.23.01.16.5350

1	2	3	4	5	5	7
27.	TIMOR TIMUR					
A.	PEMBUKAAN	1. TK Negeri Maliana	—	Maliana	Kabupaten Boonaro	11.1.1.4236.23.01.27.5110 11.1.1.4236.23.01.27.5120 11.1.1.4236.23.01.27.5150 11.1.1.4236.23.01.27.5210 11.1.1.4236.23.01.27.5220 11.1.1.4236.23.01.27.5230 11.1.1.4236.23.01.27.5250 11.1.1.4236.23.01.27.5350
		2. SLIP Negeri 2 Bazartete	—	Bazartete	Kabupaten Ueusa	11.1.1.4242.23.01.27.5110 11.1.1.4242.23.01.27.5120 11.1.1.4242.23.01.27.5150 11.1.1.4242.23.01.27.5210 11.1.1.4242.23.01.27.5220 11.1.1.4242.23.01.27.5230 11.1.1.4242.23.01.27.5250 11.1.1.4242.23.01.27.5350
		3. SMU Negeri 1 Bazartete	—	Bazartete	Kabupaten Ueusa	11.1.2.4251.23.01.27.5110 11.1.2.4251.23.01.27.5120 11.1.2.4251.23.01.27.5150 11.1.2.4251.23.01.27.5210 11.1.2.4251.23.01.27.5220 11.1.2.4251.23.01.27.5230 11.1.2.4251.23.01.27.5250 11.1.2.4251.23.01.27.5350

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

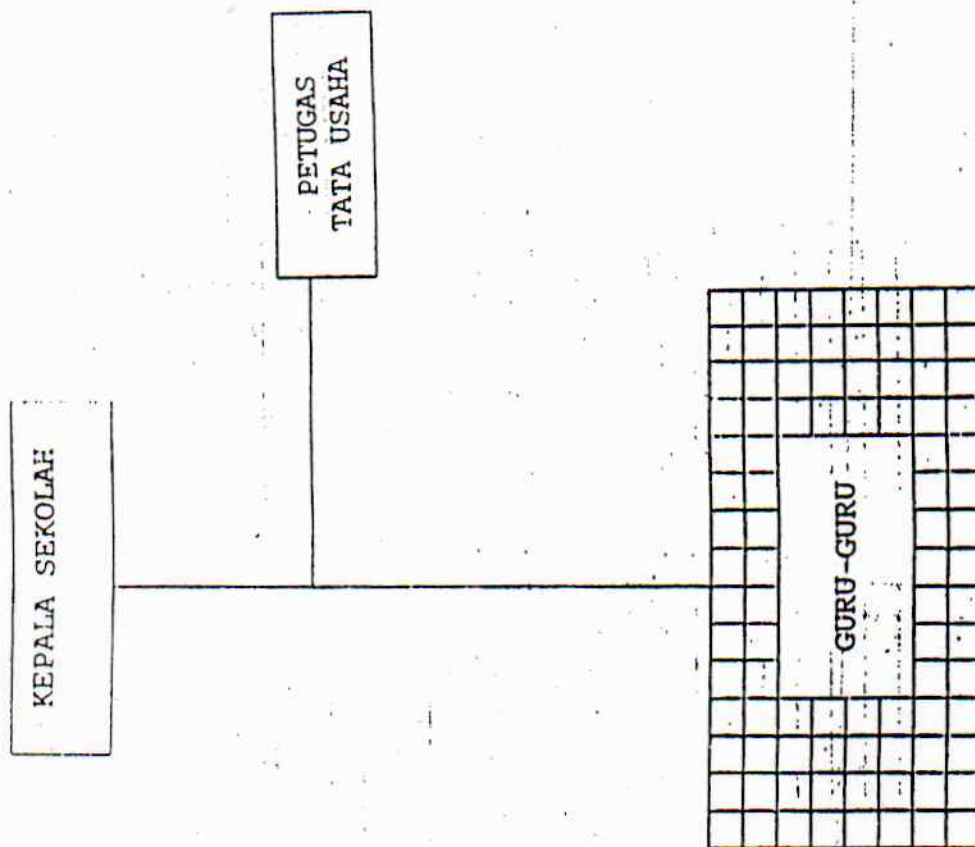
td.

Prof.Dr.—Ing. Wardiman Djonegoro

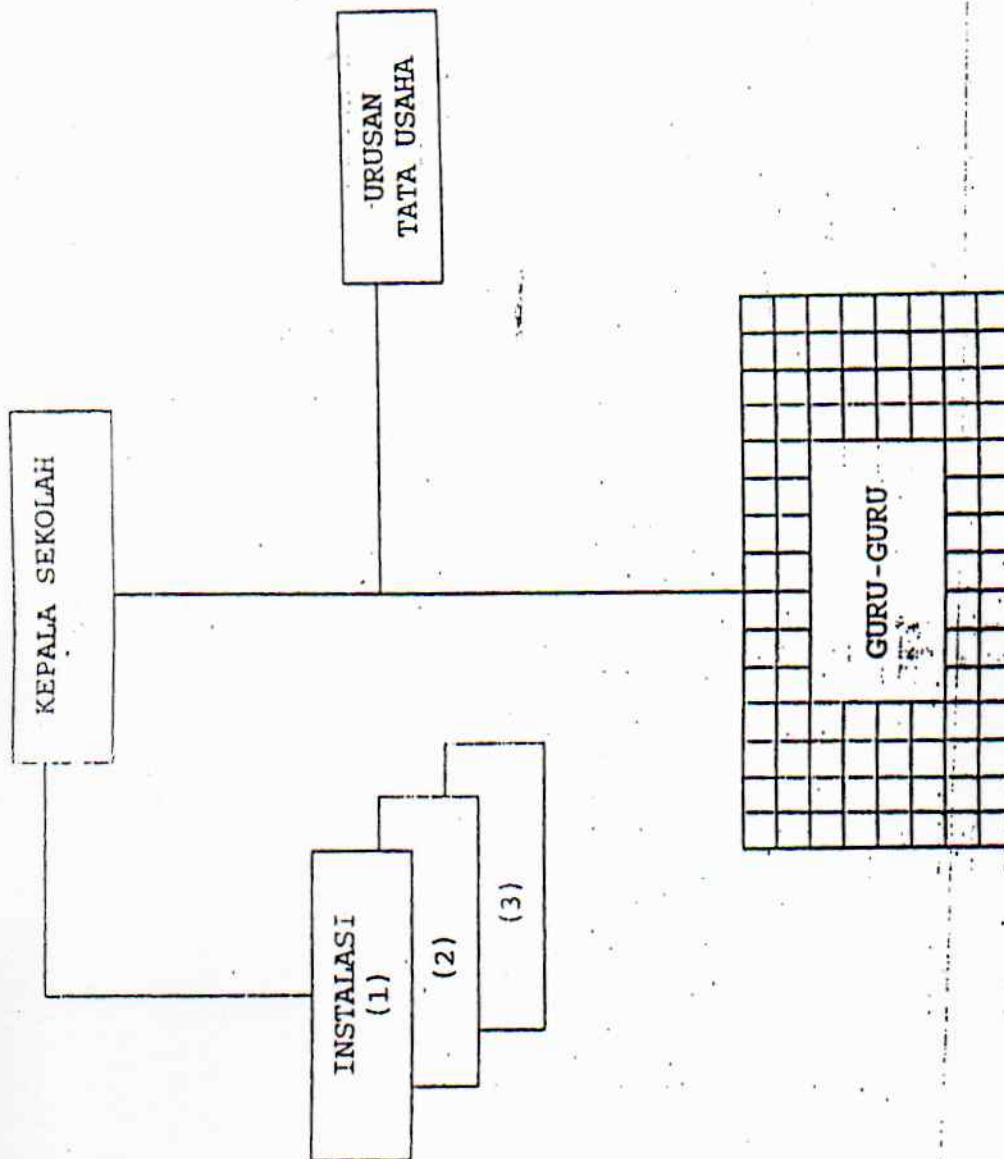
1	2	3	4	5	6	7
16.	KALIMANTAN TIMUR					
A.	PEMBUKAAN					
	1. TK Negeri Tanjung Redeb		-	Tanjung Redeb	Kabupaten Berau	11.1.1.4235.23.01.16.5110 11.1.1.4236.23.01.16.5120 11.1.1.4236.23.01.16.5150 11.1.1.4236.23.01.16.5210 11.1.1.4236.23.01.16.5220 11.1.1.4236.23.01.16.5230 11.1.1.4236.23.01.16.5250 11.1.1.4236.23.01.16.5350
	2. SLTP Negeri 16 Balikpapan		-	Balikpapan Barat	Kotamadia Balikpapan	11.1.1.4242.23.01.16.5110 11.1.1.4242.23.01.16.5120 11.1.1.4242.23.01.16.5150
	3. SLTP Negeri 2 Sembaliung		-	Sembaliung	Kabupaten Berau	11.1.1.4242.23.01.16.5210 11.1.1.4242.23.01.16.5220 11.1.1.4242.23.01.16.5230
	4. SLTP Negeri 5 Tanjung Redeb		-	Tanjung Redeb	Kabupaten Berau	11.1.1.4242.23.01.16.5250 11.1.1.4242.23.01.16.5350
	5. SLTP Negeri 2 Muara Kaman		-	Muara Kaman	Kabupaten Kutai	
	6. SLTP Negeri 3 Muara Muntai		-	Muara Muntai	Kabupaten Kutai	
	7. SLTP Negeri 3 Sebulu		-	Sebulu	Kabupaten Kutai	
	8. SLTP Negeri 3 Muara Wahau		-	Muara Wahau	Kabupaten Kutai	
	9. SLTP Negeri 2 Muara Bengkal		-	Muara Bengkal	Kabupaten Kutai	
	10. SLTP Negeri 4 Muara Badak		-	Muara Badak	Kabupaten Kutai	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 107/0/1997, TANGGAL 16 Mei 1997.

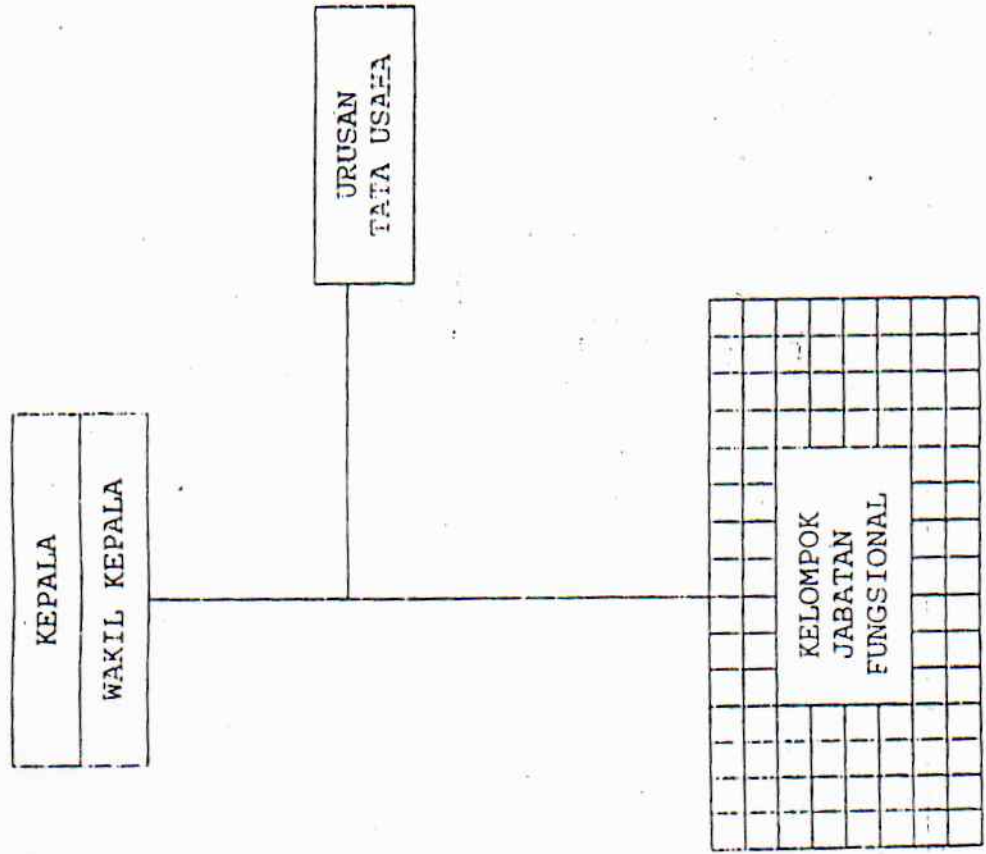
A. BAGAN ORGANISASI
TAMAN KANAK-KANAK



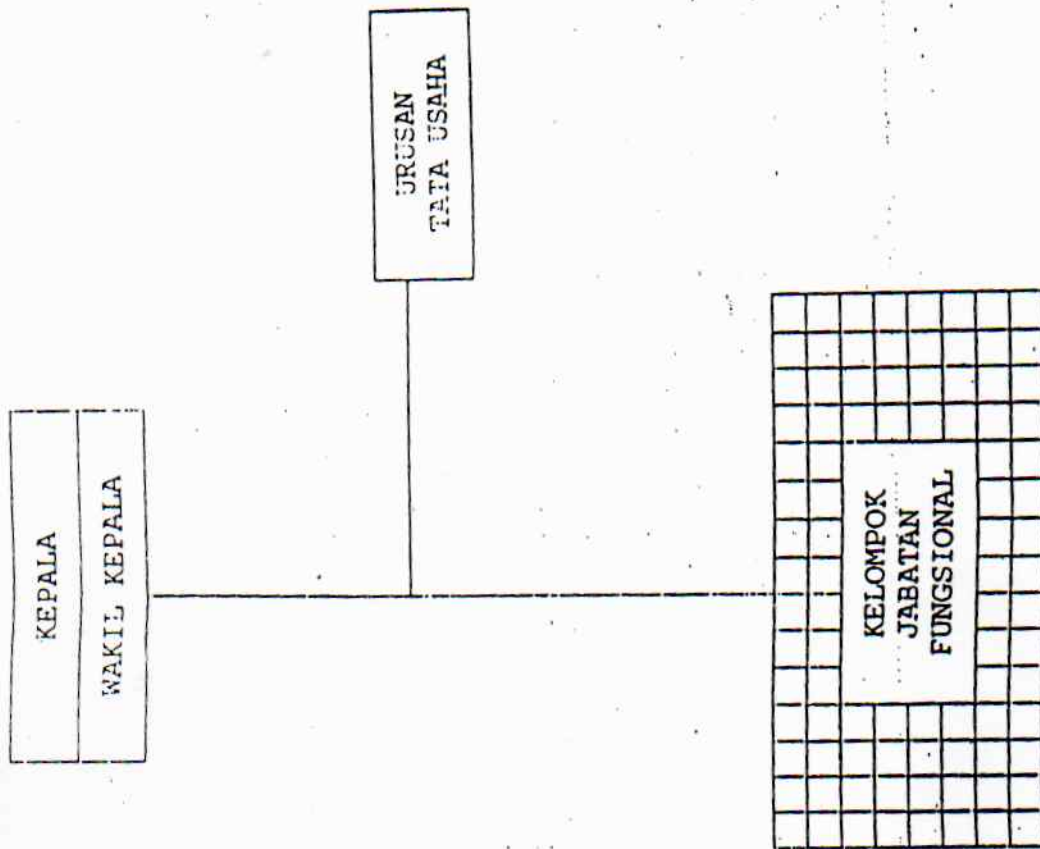
B. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH LUAR BIASA



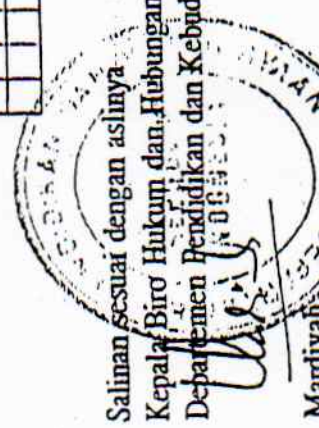
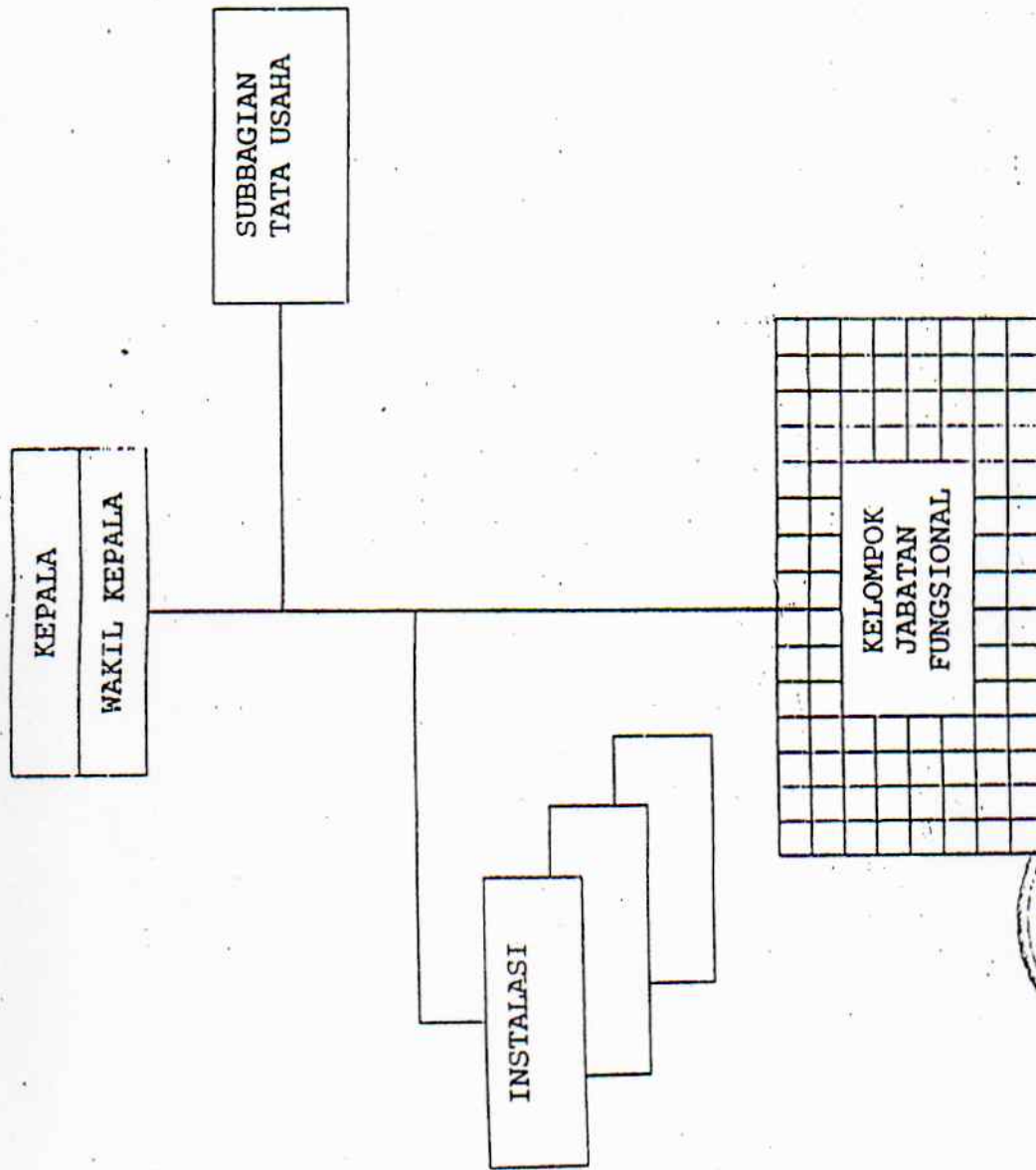
C. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA



D. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM



E. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Jalan Basuki Rahmat No. 5 Samarinda 75112 Telepon (0541) 43055, 43553, 43580 Faksimile 43580

Kepada
Yth.

1. Kepala TK Negeri Tanjung Redeb
2. Kepala SLTP Negeri 16 Balikpapan
3. Kepala SLTP Negeri 2 Samballung
4. Kepala SLTP Negeri 5 Tanjung Redeb
5. Kepala SLTP Negeri 2 Muara Kaman
6. Kepala SLTP Negeri 3 Muara Muntai
7. Kepala SLTP Negeri 3 Sebulu
8. Kepala SLTP Negeri 2 Muara Pahu
9. Kepala SLTP Negeri 2 Muara Bengkal
10. Kepala SLTP Negeri 1 Marang Kayu
11. Kepala SLTP Negeri 3 Loa Janan
12. Kepala SLTP Negeri 2 Long Kali
13. Kepala SLTP Negeri 2 Waru
14. Kepala SMU Negeri 10 Samarinda
15. Kepala SMK Negeri 4 Balikpapan

Surat Pengantar

Nomor : 2/7/ 1126.2b/PRz/1997

No.	surat Jenis Yang Dikirim	Jumlahnya	Keterangan
1	Surat Keputusan Mendikbud nomor : 107/O/1997 tanggal 16 Mei 1997 tentang : Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1995 / 1996	Masing-masing sebanyak 1 (satu) set.	Dikirim dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN YTH :

1. Kepala Kandep Dikbud Kabupaten dan Kotamadya
2. Kepala KPN Samarinda, Balikpapan dan Tarakan.

Samarinda, 11 Juli 1997

Kepala Sub Bagian PRP
Bagian Perencanaan,



NIP 130795633